



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 147 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua Tengah, perlu menetapkan Nomor rekening Bendahara Pengeluaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Pemerintah...../3

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah tahun 2003 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023, dengan Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Nomor Rekening sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan rekening Giro pada Bank Papua Cabang Nabire dan digunakan sepenuhnya untuk keperluan pelaksanaan tugas penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai bulan Januari 2023.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 18 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERINDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Pimpinan Bank Papua Cabang Nabire di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 147 TAHUN 2023

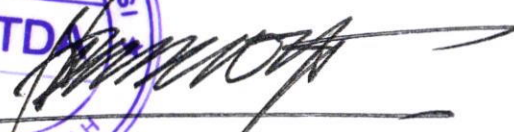
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2023

DAFTAR NOMOR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA BANK	NOMOR REKENING	KETERANGAN
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	BANK PAPUA	9000102000304	AKTIF
2.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	BANK PAPUA	9000102000175	AKTIF
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	BANK PAPUA	9000102000164	AKTIF
4.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, PENANGGULANGAN BENCANA DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	BANK PAPUA	900010200260	AKTIF
5.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BANK PAPUA	9000102000315	AKTIF
6.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	BANK PAPUA	9000102000120	AKTIF
7.	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	BANK PAPUA	9000102000035	AKTIF
8.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERTANAHAN	BANK PAPUA	9000102000245	AKTIF
9.	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	BANK PAPUA	9000102000271	AKTIF
10.	DINAS PERHUBUNGAN	BANK PAPUA	9000102000256	AKTIF
11.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	BANK PAPUA	9000102000190	AKTIF
12.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	BANK PAPUA	9000102000186	AKTIF
13.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	BANK PAPUA	9000102000223	AKTIF
14.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	BANK PAPUA	9000102000142	AKTIF

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA BANK	NOMOR REKENING	KETERANGAN
15.	SEKRETARIAT DAERAH	BANK PAPUA	9000102000046	AKTIF
16.	SEKRETARIAT DAERAH	BANK PAPUA	9000102000352	AKTIF
17.	SEKRETARIAT DAERAH	BANK PAPUA	9000102000363	AKTIF
18.	SEKRETARIAT DPRD	BANK PAPUA	9000102000201	AKTIF
19.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	BANK PAPUA	9000102000116	AKTIF
20.	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BANK PAPUA	9000102000105	AKTIF
21.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	BANK PAPUA	9000102000131	AKTIF
22.	INSPEKTORAT	BANK PAPUA	9000102000234	AKTIF
23.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BANK PAPUA	9000102000153	AKTIF
24.	SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA	BANK PAPUA	9000102000212	AKTIF

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001